

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN LAMONGAN

Irdhina Zahidah¹, Abdul Manaf Dientri²
Irdhinazahidah@gmail.com, Abd.manaf_11@yahoo.com

¹Mahasiswa jurusan akuntansi fakultas ekonomi

²Dosen jurusan akuntansi fakultas ekonomi

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of Regional Original Income and Balancing Funds on Regional Financial Independence partially or simultaneously. The population in this research is the Lamongan district APBD Budget Realization Report which is available at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Office. This research used the observation period 2012-2019, with a saturated sampling method for the last 8 years. The data analysis method used in this research is the multiple linear regression test. The variables used are Regional Original Income and Balancing Funds as independent variables, while the Regional Financial Independence variable is the dependent variable. The results of this research resulted in the finding that partially Original Regional Income has a significant effect on Regional Financial Independence, and partially Balancing Funds do not have a significant effect on Regional Financial Independence. Meanwhile, simultaneously, Regional Original Income and Balancing Funds have a significant effect on Regional Financial Independence.

Keywords: *Original Regional Income, Balancing Funds, and Regional Financial Independence.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD kabupaten Lamongan yang terdapat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD). Penelitian ini menggunakan masa pengamatan tahun 2012-2019, dengan metode sampling jenuh selama 8 tahun terakhir. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear berganda. Variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sebagai variabel bebas, sedangkan variabel Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel terikat. Hasil penelitian ini menghasilkan temuan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dan secara parsial Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan secara simultan, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Kata Kunci : **Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kemandirian Keuangan Daerah.**

Pendahuluan.

Reformasi diberbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik (Sari, 2015). Salah satunya adalah diberlakukannya otonomi daerah sejak 1 Januari 2001, yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat (Ariani dan Putri, 2016).

Era otonomi telah mengubah tata kelola keuangan dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang menuntut pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah secara optimal untuk meningkatkan sumber daya pendapatan (Wulandari *et.al*, 2019) Wilayah yang berpotensi sebagai sumber daya alam dan sumber daya manusia akan menghasilkan pendapatan besar (Badrudin *and* Kuncorojati, 2018).

Begitu pula dengan keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh setiap pemerintah kabupaten/ pemerintah kota. Semakin besar PAD dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat maka pemerintah kabupaten/pemerintah kota tersebut dikatakan mandiri (Sari, 2015).

Menurut Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah (Erawati dan Suzan, 2015).

Selain PAD, Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Akan tetapi, diharapkan setiap daerah tidak menjadikan dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah tapi menjadikannya sebagai sumber pendapatan pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri (Andriani dan Wahid, 2018).

Penelitian ini berpedoman pada literatur yang ada untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, khususnya untuk kabupaten Lamongan dengan berpedoman pada penelitian Nur'ainy dkk (2013) dan penelitian Andriani dan Wahid (2018) dalam melakukan penelitian dengan variabel sejenis.

Tinjauan Pustaka

Akuntansi Sektor Publik

Siregar (2017:1) mengemukakan akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Karena organisasi sektor publik yang paling utama adalah pemerintahan,

maka akuntansi sektor publik juga dapat dinyatakan sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah.

Arif *et.al* dalam Sudaryo dkk (2017: 33) mengatakan didalam akuntansi sektor publik ada akuntansi pemerintahan dan akuntansi non-pemerintahan. Akuntansi pemerintahan diartikan sebagai aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah kepada para pengguna berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Sedangkan akuntansi non-pemerintahan adalah persekutuan antar lembaga internasional swasta yang mengabdikan diri dalam bidang agama, ilmu pengetahuan, budaya dan sebagainya, baik yang berorientasi teknik maupun berorientasi ekonomi.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah bukanlah tantangan yang mudah, karena otonomi daerah harus didasarkan pada kesadaran bahwa otonomi daerah adalah suatu peluang bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemerdekaannya. Ini artinya otonomi daerah tidak bisa dilihat sebagai kegagalan. Implementasi otonomi daerah harus diarahkan untuk mempercepat realisasi kesejahteraan masyarakat melalui peran pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah (Putri *et.al*, 2020).

Kemandirian Keuangan Daerah

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa “kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi”.

Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui kemandirian yang dilakukan daerah dengan mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi yang serta diharapkan dengan diselenggarakannya otonomi daerah.

Kemandirian suatu daerah dilihat dari APBD-nya. Semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah terdiri dari PAD, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat tanpa muatan Kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah (Asraf *et.al*, 2019)

Menurut Halim dan Kusufi (2014: 5) kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah bukan persyaratan utama dalam menggerakkan daerah. Namun, mereka merupakan persyaratan penting yang harus dicapai oleh pemerintah kabupaten / kota (Darsana *and* Aswitari, 2019).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah sumber utama pendapatan daerah yang berasal dari pengembangan potensi daerah dan digunakan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat (Awwaliyah *et.al*, 2019).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang di dapat dari hasil kelola pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 285 paragraf 1 tentang pendapatan ayat 1 (a) bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Optimalisasi dalam menerima Pendapatan Asli Daerah harus didukung oleh upaya-upaya lokal pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi berlebihan terhadap PAD hanya akan terjadi membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi kawasan dan mengancam perekonomian (Yasin, 2019).

Dana Perimbangan

Menurut Siregar (2017: 82) dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan pokok masing-masing dana perimbangan tersebut adalah: 1) Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; 2) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketidakseimbangan horizontal (horizontal imbalance) antar pemerintah daerah; 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketidakseimbangan antar daerah dalam memberikan pelayanan dasar.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dimana penelitian ini akan dilakukan pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data menggunakan prosedur statistik. Sedangkan pendekatan kuantitatif menurut Chandrarin (2017: 122), data kuantitatif adalah jenis data yang berupa angka-angka yang berasal dari perhitungan masing-masing atribut pengukuran variabel.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan meminta data di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan yang bertempat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1, Kauman, Sidoharjo, Kec. Lamongan Kabupaten Lamongan, atau mengambil data dengan melalui situs web bpkad.lamongankab.go.id, yang dilakukan selama 3 bulan yaitu dari bulan April sampai Juni 2020.

3.3. Obyek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu hal yang akan diteliti dengan mendapatkan data untuk tujuan penelitian agar dapat ditarik kesimpulan setelah melakukan penelitian. Objek penelitian yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Lamongan tahun 2012-2019.

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen sejenis yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Chandrarini, 2017: 125). Populasi dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD kabupaten Lamongan yang terdapat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tahun 2012-2019. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara *time-series*. Data *time series* adalah data satu objek yang meliputi beberapa periode waktu.

Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Lamongan tahun 2014-2018. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD selama 8 tahun terakhir pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan.

3.5. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Menurut Sugiyono (2016: 39), variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah kemandirian keuangan daerah. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu dengan cara mencatat atau mendokumentasikan data yang sudah ada dan data penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2012-2019.

3.7. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang menjelaskan bagaimana variabel diukur. Definisi operasional dari variabel penelitian ini yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAD bertujuan untuk memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mendanai implementasi otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan dari Desentralisasi. Sumber terbesar penerimaan penerimaan (PAD) di tingkat provinsi diperoleh dari pajak daerah (Syapsan, 2017).

Indikator variabel PAD adalah Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan di LRA APBD.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan pemerintah daerah yang ditransfer oleh pemerintah pusat bermaksud mengurangi ketidak seimbangan sumber dana pemerintah antara pusat dan daerah. Jika Realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pendapatan daerah, akan ada defisit (Thalib *and* Ekaningtyas, 2019).

Indikator variabel Dana Perimbangan adalah Total Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Lamongan di LRA APBD.

3. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah adalah Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Pentingnya menerapkan keuangan daerah manajemen secara profesional, akuntabel dan transparan, cara perlu untuk mengetahui sejauh mana keandalan Laporan Keuangan Daerah, salah satunya adalah dengan menganalisis rasio keuangan terhadap APBD. Rasio terdiri dari tingkat desentralisasi, rasio daerah ketergantungan keuangan, dan rasio keuangan daerah kemerdekaan (Yuliansyah *et.al*, 2019).

Indikator variabel Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

Rasio KKD = $\left[\frac{\text{Total Realisasi PAD}}{\text{Total Realisasi Transfer Pusat} + \text{Total Realisasi Transfer Provinsi} + \text{Total Realisasi Pinjaman}} \right] \times 100$

3.8. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknis analisis kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda (*multiple linear regression*). Analisis regresi berganda dapat menjelaskan pengaruh antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Untuk mempermudah dalam menganalisis digunakan *software* SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Langkah-langkah analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

1. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk menguji dan menjelaskan karakteristik sampel yang diobservasi. Hasil uji statistik deskriptif biasanya berupa tabel yang setidaknya berisi nama variabel yang diobservasi, mean, deviasi standar (standar deviation), maksimum dan minimum, yang kemudian diikuti penjelasan berupa narasi yang menjelaskan interpretasi isi tabel tersebut (Chandrarin, 2017: 139).

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, diperlukan pengujian asumsi klasik agar sampel dapat benar-benar mewakili populasi secara keseluruhan. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1) Uji Normalitas

Uji Normalitas menentukan apakah suatu model berdistribusi normal atau tidak, dalam penelitian ini pengujian normalitas yang dipakai adalah dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik Normal P-P *Plot of Regression Standardized Residual*. Jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut dikatakan normal (Priyanto, 2018:128).

2) Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menguji pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada

tidaknya multikolinearitas di dalam regresi dapat dilihat dari *tolerance value* dan nilai *variance inflation factor* (VIF) (Hartono dan Nugrahanti, 2014).

3) Uji Autokorelasi

Pengujian ini digunakan untuk menguji suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, tidak terjadi heteroskedastisitas (Priyanto, 2018:141).

4) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengguna periode satu dengan kesalahan pada periode t-1 (tahun sebelumnya). Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi Uji Durbin-Watson (*DW Test*) (Hartono dan Nugrahanti, 2014).

3. Uji Regresi Linear Berganda

Uji model regresi berganda yaitu uji yang digunakan untuk memperkirakan atau meramalkan nilai dari variabel dependen (Y) dengan memperhitungkan variabel-variabel dependen (Meidona dan Yanti, 2018). Persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kemandirian Keuangan Daerah

α = konstanta

b_1, b_2 = koefisien regresi

ε = eror estimate

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Perimbangan

4. Uji Hipotesis

1) Uji t (parsial)

Uji signifikansi variabel (uji t) bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang diformulasikan dalam model (Chandrarin, 2017:124). Jika hasil analisis menunjukkan nilai $p \leq 0,05$, maka pengaruh variabel independen terhadap satu variabel dependen adalah secara statistik signifikan pada level alfa sebesar 5%. Jika hasil analisis menunjukkan nilai $p > 0,05$, maka pengaruh variabel dependennya secara statistik tidak signifikan.

2) Uji F (simultan)

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah semua variabel independen terhadap satu variabel dependen sebagaimana yang diformulasikan dalam suatu model persamaan regresi linear berganda sudah tepat (fit) (Chandrarin, 2017:124). Jika hasil analisis menunjukkan nilai $p \leq 0,05$, maka model persamaannya signifikan pada level alfa sebesar 5%. Jika hasil analisis menunjukkan nilai $p > 0,05$, maka model persamaannya tidak signifikan pada level alfa sebesar 5%.

3) Uji koefisien determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) merupakan besaran yang menunjukkan proporsi variasi variabel independen yang mampu menjelaskan variasi variabel dependen (Chandrarin, 2017 : 141).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Statistik Deskriptif

Descriptive

Statistics

	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Deviat ion
KK	8	10,25	21,86	17,1856	4,30498
D					
PAD	8	12928 79425	47199 58255	328214 666833, 0875	13035 20926 23,918
DP	8	36,02 10066 83509 910	74,84 17086 80363 941	141791 310664 4,25	28278 11111 28,199
Valid N (list wise)	8				

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22 (2020)

Berdasarkan tabel diatas diketahui kemandirian keuangan daerah memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 17,1856 dengan standar deviasi sebesar 4,30498. Nilai minimum dari variabel kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 10,25 yang diperoleh pada tahun 2012 dan nilai maksimumnya adalah sebesar 21,86 yang diperoleh pada tahun 2016.

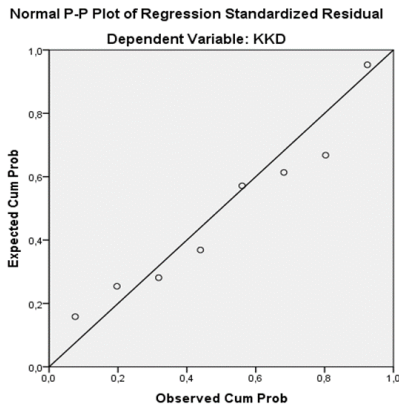
Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 328.214.666.833,0875 dengan standar deviasi sebesar Rp. 130.352.092.623,91862. Nilai minimum dari variabel pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp. 129.2879.425.36,02 yang diperoleh pada tahun 2012 dan nilai maksimumnya adalah sebesar Rp. 471.995.825.574,84 yang diperoleh pada tahun 2019.

Berdasarkan Tabel diatas, diketahui nilai Dana Perimbangan memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 1.417.913.106.644,25 dengan standar deviasi sebesar Rp. 282.781.111.128,199. Nilai minimum dari variabel dana perimbangan adalah sebesar Rp. 1.006.683.509.910 yang diperoleh pada tahun 2012 dan nilai maksimumnya adalah sebesar Rp. 1.708.680.363.941 yang diperoleh pada tahun 2016.

4.1.2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Gambar 2



Uji Normalitas

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22 (2020)

Berdasarkan uji normalitas menggunakan grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik grafik menyebar disekitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PAD	,100	9,984
DP	,100	9,984

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22 (2020)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai VIF Pendapatan Asli Daerah sebesar $9,984 < 10$ dan nilai VIF Dana Perimbangan sebesar $9,984 < 10$. Nilai *tolerance* Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,100 > 0,10$ dan nilai *tolerance* Ketepatan Alokasi Belanja sebesar $0,100 > 0,10$. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22 (2020)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,912. Jika melihat tabel DW dengan tingkat signifikansi 5% dan n sebanyak 8, serta jumlah variabel independen adalah 2 ($k = 2$), maka diperoleh nilai $dU = 1,7771$ dan nilai $dL = 0,5591$. Kriteria suatu data dikatakan tidak terjadi autokorelasi adalah $dU < DW < 4 - dU$ dimana $1,7771 < 1,912 < 2,2229$, maka dapat disimpulkan data ini tidak terjadi autokorelasi karena nilai DW berada diantara nilai dU dan $4 - dU$.

Model Summary^b

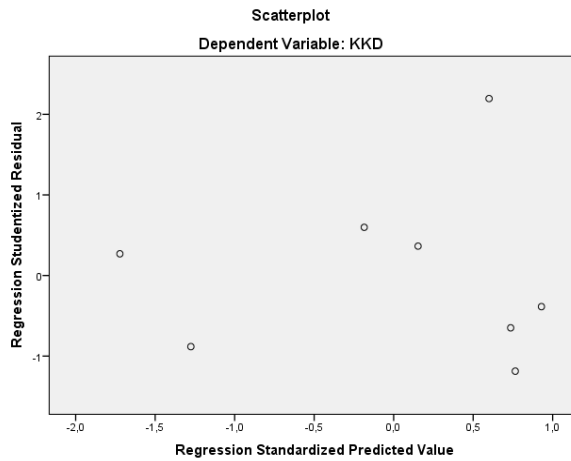
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,967 ^a	,935	,909	1,30173	1,912

a. Predictors: (Constant), DP, PAD

b. Dependent Variable: KKD

4. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3



Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22 (2020)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi atau sig. variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,789 dan variabel Ketepatan Alokasi Belanja sebesar 0,642. Karena nilai kedua variabel independen (X) > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak mengandung heteroskedastisitas. Artinya model regresi yang digunakan untuk penelitian ini layak untuk dilakukan.

4.1.3. Uji Regresi Linear Berganda

Adapun hasil regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-200,681	132,329		-1,517	,190
PAD	19,997	7,325	,986	2,730	,041
DP	-,958	17,242	-,020	-,056	,958

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22 (2020)

Dari tabel di atas diperoleh nilai konstanta sebesar -200,681, nilai β_1 sebesar 19,997 dan nilai β_2 sebesar -0,958 dari hasil tersebut dapat disusun persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = -200,681 + 19,997X_1 - (-0,958X_2) + e$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) = -200,681 menyatakan bahwa jika variabel independen yaitu PAD dan Dana Perimbangan dianggap konstan maka Kemandirian Keuangan Daerah akan meningkat sebesar -200,681 poin.
2. Koefisien regresi variabel PAD (X_1) = 19,997 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) akan mendorong peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 19,997 poin dengan anggapan variabel PAD (X_1) adalah tetap/konstan.
3. Koefisien regresi variabel Dana Perimbangan (X_2) = -0,958 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 poin variabel Dana Perimbangan (X_2) akan menurunkan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar -0,958 poin dengan anggapan variabel Dana Perimbangan (X_2) adalah tetap/konstan.
4. Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

4.1.4. Uji Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-200,681	132,329		-1,517	,190
PA D	19,997	7,325	,986	2,730	,041
DP	-,958	17,242	-,020	-,056	,958

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22 (2020)

Dari di atas, hasil yang diperoleh bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai angka signifikan 0.041 dan nilai thitung 2,730 Berdasarkan hasil

tersebut, nilai Sig. $0.041 < \alpha (0.05)$ dan nilai $t_{hitung} 2,730 > t_{tabel} 2,570$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima H_a ditolak, yang berarti koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial atau individual berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Dari tabel di atas, hasil yang diperoleh bahwa variabel Dana Perimbangan mempunyai angka signifikan 0,958 dan nilai $t_{hitung} -0,056$. Berdasarkan hasil tersebut, nilai Sig. $0,958 > 0,05$ dan juga nilai $t_{hitung} -0,056 < t_{tabel} 2,570$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima yang berarti koefisien regresi variabel Dana Perimbangan secara parsial atau individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

2. Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	121,257	2	60,629	35,780	,001 ^b
Residual	8,473	5	1,695		
Total	129,730	7			

a. Dependent Variable: KKD

b. Predictors: (Constant), DP, PAD

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22 (2020)

Dari tabel di atas, hasil yang diperoleh bahwa dari uji ANOVA terlihat nilai signifikan sebesar 0.001 dan nilai $F_{hitung} 35,780$. Berdasarkan hasil tersebut, nilai Sig. $0.001 < 0.05$ dan juga nilai $F_{hitung} 35,780 > F_{tabel} 5,14$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima, yang berarti secara simultan PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,967 ^a	,935	,909	1,30173

a. Predictors: (Constant), DP, PAD

b. Dependent Variable: KKD

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22 (2020)

Dari tabel di atas, kolom R adalah sebesar 0,967 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara Kemandirian Keuangan Daerah (variabel dependen) dengan PAD dan Dana Perimbangan (variabel independen) adalah sangat kuat karena berada di atas 0.5 (50%) dan juga mendekati angka 1 (100%).

Kolom adjusted R square atau koefisien determinasi yang disesuaikan adalah 0,909. Hal ini menunjukkan bahwa 90.9% variasi atau perubahan dalam Kemandirian Keuangan Daerah dapat dijelaskan oleh variasi variabel PAD dan Dana Perimbangan. Sedangkan sisanya sebesar 9,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Lamongan Tahun 2012-2019

Dari hasil analisis dalam penelitian ini selama 8 tahun, yaitu pada tahun 2012 sampai dengan 2019 yang dilakukan uji statistik t dengan software program SPSS 22, diperoleh nilai Sig. $0,041 < 0.05$ dan juga nilai $t_{hitung} 2,730 > t_{tabel} 2,570$.

Berdasarkan hasil tersebut yang berarti koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah signifikan sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Andriani dan Wahid (2018), Nur'ainy dkk (2013), Maulidah dan Zakhiya (2011) dan Tolosang (2018), bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah namun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri, *et.al* (2012) bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh secara signifikan Kemandirian Keuangan Daerah.

4.2.2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Lamongan Tahun 2012-2019

Dasar pengambilan keputusan penerimaan hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan nilai probabilitas signifikan dengan nilai taraf signifikan $\alpha = 0.05$.

Dari hasil analisis dalam penelitian ini selama 8 tahun, yaitu pada tahun 2012 sampai dengan 2019 yang dilakukan uji statistik t dengan software program SPSS 22, diperoleh nilai Sig. $0,958 > 0.05$ dan juga nilai $t_{hitung} -0,056 < t_{tabel} 2,570$.

Berdasarkan hasil tersebut yang berarti koefisien regresi Dana Perimbangan adalah signifikan sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Dana Perimbangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2016) yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arpani dan Halmawati (2020) dan Andriani dan wahid (2018) yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

4.2.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Lamongan Tahun 2012-2019

Dasar pengambilan keputusan penerimaan hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan nilai probabilitas signifikan dengan nilai taraf signifikan $\alpha = 0.05$.

Dari hasil analisis dalam penelitian ini selama 8 tahun, yaitu pada tahun 2012 sampai dengan 2019 yang dilakukan dengan uji statistik F dengan software program SPSS 22, diperoleh nilai Sig. $0.001 < 0.05$ dan juga nilai Fhitung $35,780 > F_{tabel} 5,14$.

Berdasarkan hasil tersebut yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Lamongan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Wahid (2018), Nur'ainy dkk (2018), Kustianingsih dkk (2018) dan Gaghana dkk (2018) yang menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa simpulan, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Lamongan tahun 2012-2019.
2. Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Lamongan tahun 2012-2019. Dana perimbangan juga memiliki kontribusi yang rendah terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten Lamongan. Kontribusi Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) terhadap Total Pendapatan Daerah menunjukkan angka tinggi selama periode penelitian tahun 2012-2019. Berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten Lamongan terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi.
3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Lamongan tahun 2012-2019.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti faktor – faktor lain yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah atau menambah runtun waktu lebih lama, karena dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sehingga akan menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.
2. Bagi pemerintah diharapkan dari penelitian ini dapat mempertimbangkan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan memperkecil dana transfer dari pemerintah pusat atau dana perimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R. Neneng Rina dan Wahid, Nisa Noor. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015)." *Jurnal Akuntansi* Volume 13. hlm: 30-39.
- Ariani, Kurnia Rina. dan Putri, Gustita Arnawati. 2016. "Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah." *Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper* Halaman: 364-369.
- Arpani, Wike Nurliza dan Halmawati. 2020. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi empiris pada kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2018)." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Vol. 2, No 1, Hal 2373-2390.
- Asraf, et.al. 2019. "THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) AND GENERAL ALLOCATION FUNDS (DAU) ON CAPITAL GOODS EXPENDITURE IN WEST PASAMAN." *e-Jurnal Apresiasi Ekonomi* Volume 7, Nomor 1, hal : 30 - 37.
- Awwaliyah, Noor Farieda. et al. 2019. "The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* Vol. 1 No.1 hlm: 25-46.
- Badrudin, Rudy and Kuncorojati, Irawan. 2017. "THE EFFECT OF DISTRICT OWN-SOURCE REVENUE AND BALANCE FUNDS ON PUBLIC WELFARE BY CAPITAL EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH AS AN INTERVENING VARIABLE IN SPECIAL DISTRICT OF YOGYAKARTA." *JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN* VOL. 19, NO. 1, PP. 54–59 .
- Chandrarin, Grahita. 2017. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darsana, Ida Bagus and Aswitari, LP. 2019. "The Influence Of Regional Financial Capability Index And Financial Independence Level On Economic Growth And Community Welfare In Regencies/City In Bali ." *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* Volume 24, Issue 8, hlm:54-46
- Erawati, Nyoman Trisna dan Suzan, Leny. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus pada DPKAD Kota Bandung Periode 2009-2013)." *e-Proceeding of Management* Vol.2, No.3. Halaman: 3259-3260.
- Gaghana, Ramona Leny. dkk. 2018. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon dan Kota Kotamobagu)." *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol. 19 No. 7 hlm: 1-13.

- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. dan Kusufi, Muhammad Syam. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iryanic, Emy. dan Wulandari, Phaureula Artha. 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Janie, Dyah Nirmala Arum. 2012. *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda dengan SPSS*. Semarang: University Press.
- Kustianingsih, Nurafni. dkk. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada Perintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah." *Katalogis Volume 6 Nomor 6*. Halaman: 82-91.
- Nugroho, Bhuono dan Agung. 2010. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik. Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nur'ainy, Renny. dkk. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kota di Jawa Barat)." *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)* Vol. 5. Halaman: 95-104.
- Priyatno, Dwi. 2014. *SPSS 22 Pengelolaan Data Terpraktis*. Yogyakarta: CV Ando Offset.
- Purnama, Wulan Ayu. 2016. "Pengaruh Komponen PAD, Leverage, dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/kota di Provinsi Lampung)." *Ekonomi dan Bisnis* Vol. 20 hlm. 22.
- Putri, Rumanintya Lisaria. et al. 2020. "The Importance of Regional Original Income, Balance Fund and Demography on Flypaper Effect through the Regional Government Expenditure ." *International Journal of Research in Humanities and Social Studies* Volume 7, Issue 2, PP 33-45 .
- Rahmayati, Anim dan Pertiwi, Imanda Firmantyas. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia." *Journal Of Islamic Finance and Accounting* Vol. 1, No. 1, hlm: 1-10.
- Sari, Putri Ika. 2015. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014)." *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta* Halaman: 537-545.
- Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Edisi II*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sudaryo, Yoyo. dkk. 2017. *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syapsan. 2017. "The Influence of the Original Revenue Balance Fund and Regional Income Areas at the Level of Provinces and Regency/City in Indonesia ." *International Journal of Finance and Accounting* Volume: 6, Issue: 1, PP: 1-7.
- Tahar, Afrizal dan Zakhya, Maulida. 2011. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah." *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 12 No. 1, halaman: 88-99.
- Thalib, Firmansyah and Ekaningtias, Diah. 2019. "The effect of original LG revenue, balancing fund, and capital expenditure on LG financial performance in regencies in East Java Province ." *The Indonesian Accounting Review* Vol. 9, No. 1, Pages 39 - 49.
- Tolosang, Krest D. 2018. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 18 No. 03 hlm: 79-92.
- Wulandari, Eva. et al. 2018. "Effect Of Original Local Government Revenues, General Allocation Funds, Spesial Allocation Funds, Share Funds, Other Legal Revenues, Budget Surplus/ Deficit to Human Development Index Through Capital Expenditures: Case Study of Regencies in Indonesia." *Review of Integrative Business and Economics Research* Vol. 7 hlm: 125-137.
- Yasin, Muhammad. 2019. "Analysis Of Regional Original Income Levels In Regional Financial Performance On Economic Growth In East Java Province." *Archives of Business Research* Vol.7, No.10, hlm: 222-229.
- Yuliansyah, Rahmat. et al. 2019. "The Effect of Regional Original Revenue, Balance Funds, and Capital Expenditures on the Financial Performance of District Governments in West Java Province in 2013-2017 ." *Advances in Economics, Business and Management Research* volume 127, pp 152-156.

